



## Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Pasca Bencana Banjir di Desa Dampal Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala

### *The Role of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in Post-Flood Disaster Management in Dampal Village, Sirenja District, Donggala Regency*

Yunus<sup>1\*</sup>, Irnayanti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Tadulako

\*Corresponding Author: E-mail: yunus.fisip@gmail.com

#### Artikel Penelitian

#### Article History:

Received: 07 Apr, 2025

Revised: 20 May, 2025

Accepted: 20 May, 2025

#### Kata Kunci:

Badan Penanggulangan  
Bencana Daerah (BPBD);  
Penanggulangan Pasca  
Bencana Banjir;  
Desa Dampal Kecamatan  
Sirenja Kabupaten Donggala

#### Keywords:

Regional Disaster  
Management Agency  
(BPBD); Post-Flood  
Disaster Management;  
Dampal Village, Sirenja  
District, Donggala Regency

#### ABSTRAK

Pendahuluan: Banjir merupakan salah satu bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia, termasuk di wilayah pedesaan yang memiliki sistem drainase kurang memadai. Desa Dampal, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, menjadi salah satu wilayah terdampak banjir bandang pada tahun 2024 yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur, pemukiman, serta terganggunya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Dalam kondisi pasca bencana, peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sangat penting untuk memulihkan kondisi masyarakat melalui proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana BPBD Kabupaten Donggala menjalankan fungsinya dalam penanggulangan pasca bencana di Desa Dampal.

Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif untuk memperoleh gambaran mendalam mengenai peran BPBD dalam penanggulangan pasca bencana banjir. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap lima orang informan yang terdiri dari unsur pemerintah desa, BPBD, dan tokoh masyarakat. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi tahap pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil: Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPBD Kabupaten Donggala dalam penanggulangan pasca bencana banjir di Desa Dampal belum berjalan secara maksimal. Meskipun BPBD telah melakukan penyaluran bantuan logistik pada tahap tanggap darurat, namun upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya. Hambatan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait, sehingga proses pemulihan bagi masyarakat terdampak berjalan lambat dan belum merata.

#### ABSTRACT

*Introduction: Flooding is one of the most frequent natural disasters in Indonesia, especially in rural areas with inadequate drainage systems. Dampal Village, located in Sirenja District Donggala Regency, was one of the areas affected by a flash flood in 2024, which caused damage to infrastructure, residential areas, and disrupted social and economic activities. In the post-disaster phase, the role of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) is crucial in restoring community conditions through rehabilitation and reconstruction efforts. This study was conducted to determine the extent to which BPBD of Donggala Regency carried out its functions in post-disaster management in Dampal Village.*

*Methods: This study uses a qualitative approach with a descriptive type to obtain an in-depth overview of the role of BPBD in post-flood disaster management. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving five informants consisting of village government officials, BPBD representatives, and community leaders. Data analysis was carried out using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldana, which includes the stages of data collection, data condensation, data display, and conclusion drawing.*

*Results: The results of the study indicate that the role of BPBD in Donggala Regency in post-flood disaster management in Dampal Village has not been carried out optimally. Although BPBD provided logistical assistance during the emergency response phase, the efforts for post-disaster rehabilitation and reconstruction have not been fully implemented according to its duties and functions. The main obstacles faced include limited budget, lack of human resources, and weak coordination among related agencies, resulting in a slow and uneven recovery process for the affected community*

DOI: 10.56338/jks.v8i5.7524

## PENDAHULUAN

Bencana alam merupakan fenomena yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Salah satu bentuk bencana yang paling sering terjadi di Indonesia adalah banjir. Banjir dapat menimbulkan dampak besar terhadap kehidupan masyarakat, baik dari segi sosial, ekonomi, hingga psikologis. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana didefinisikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam, maupun manusia yang mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dalam konteks ini, banjir menjadi salah satu bencana yang memiliki frekuensi kejadian tinggi, khususnya pada musim penghujan, dan berpotensi besar merusak berbagai aspek kehidupan masyarakat. Tidak hanya di kawasan perkotaan, wilayah pedesaan pun turut merasakan dampak banjir yang signifikan, terutama karena minimnya infrastruktur pengendali banjir seperti drainase, tanggul, dan sistem peringatan dini.

Desa Dampal, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, merupakan salah satu wilayah di Sulawesi Tengah yang mengalami bencana banjir bandang pada tahun 2024. Banjir tersebut tidak hanya menggenangi pemukiman warga, tetapi juga merusak berbagai fasilitas umum, seperti sekolah, tempat ibadah, lahan pertanian, dan akses jalan utama. Bencana yang terjadi secara tiba-tiba pada tanggal 23 Juni 2024 ini menyebabkan lebih dari 250 keluarga terdampak secara langsung, dengan kerugian material yang cukup besar. Selain rumah dan lahan pertanian, beberapa fasilitas pendidikan dan kesehatan juga mengalami kerusakan. Bahkan, terdapat warga yang mengalami luka-luka dan satu rumah warga dilaporkan hanyut terbawa arus deras. Kejadian ini memperlihatkan betapa rentannya masyarakat Desa Dampal terhadap bencana banjir, terlebih dengan kondisi geografis yang berada di dataran rendah dan minimnya sistem penanggulangan risiko bencana di tingkat desa.

Dalam situasi pasca bencana seperti ini, peran lembaga pemerintah sangat krusial, terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang memiliki mandat untuk melakukan penanganan bencana secara komprehensif, mulai dari tahap pra-bencana, tanggap darurat, hingga pasca-bencana. Fungsi BPBD yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan meliputi pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Namun, berdasarkan hasil observasi awal peneliti di Desa Dampal, pelaksanaan penanggulangan pasca bencana oleh BPBD Kabupaten Donggala masih belum optimal. Banyak masyarakat yang mengeluhkan bahwa BPBD hanya hadir dalam tahap darurat dengan membawa bantuan logistik beberapa hari setelah banjir terjadi, sementara proses pemulihan, seperti perbaikan infrastruktur, dukungan psikososial, dan pemulihan ekonomi belum dilakukan secara menyeluruh.

Bencana banjir bukan hanya tentang dampak fisik yang ditimbulkan, tetapi juga menyangkut proses pemulihan jangka panjang masyarakat terdampak. Dalam hal ini, BPBD seharusnya berperan sebagai pelopor, stabilisator, inovator, modernisator, dan pelaksana langsung sebagaimana teori peran dari Siagian (2012). Dalam kenyataannya, berbagai kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga ahli, serta lemahnya koordinasi antar instansi menjadi penghambat utama efektivitas BPBD dalam menjalankan tugasnya. Padahal, keberhasilan penanggulangan pasca bencana sangat bergantung pada kesiapan dan kapasitas kelembagaan BPBD dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang ada serta menjalin kemitraan yang sinergis dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, organisasi masyarakat, dan relawan lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian mengenai "Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Pasca Bencana Banjir di Desa Dampal Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala." Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai bagaimana implementasi peran BPBD dalam konteks rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi instansi terkait dalam meningkatkan kualitas penanggulangan bencana di masa mendatang.

## METODE

Dalam rangka menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam mengenai peran BPBD dalam penanggulangan pasca bencana banjir, khususnya dalam konteks sosial, budaya, dan kelembagaan di Desa Dampal, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala. Penelitian deskriptif kualitatif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis kuantitatif, melainkan untuk mengeksplorasi fenomena yang kompleks dan berakar dari dinamika masyarakat serta struktur birokrasi lokal yang berperan dalam kebijakan penanggulangan bencana. Penelitian ini bersifat evaluatif, dalam arti bahwa fokus utamanya adalah menilai efektivitas pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan BPBD dalam melaksanakan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Penelitian evaluatif membantu mengidentifikasi kesenjangan antara tujuan institusional dan pelaksanaannya di lapangan. Dengan demikian, penelitian ini tidak sekadar mendeskripsikan fakta, tetapi juga menganalisis pelaksanaan program dan kebijakan berdasarkan kerangka teori yang ditetapkan sebelumnya.

Dalam praktiknya, data yang dikumpulkan bersumber dari dua jenis utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan utama melalui teknik wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi lapangan. Informan yang dipilih terdiri dari perwakilan kelembagaan seperti Kepala Desa Dampal, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kecamatan Sirenja, Ketua Pelaksana BPBD Donggala, serta dua tokoh masyarakat yang memiliki pengetahuan langsung mengenai dampak dan penanganan pasca bencana banjir. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan kebutuhan data penelitian.

Sementara itu, data sekunder dihimpun melalui studi dokumentasi yang meliputi laporan-laporan resmi BPBD, dokumentasi kebijakan, berita media, serta literatur akademik yang relevan dengan topik. Data ini sangat penting untuk memberikan konteks, menguatkan temuan lapangan, serta membangun argumentasi teoretik dalam analisis hasil penelitian.

Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada model interaktif yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana. Model ini melibatkan empat tahapan utama, yakni: (1) pengumpulan data, (2) kondensasi data, (3) penyajian data, dan (4) penarikan serta verifikasi kesimpulan. Proses ini bersifat siklikal dan dinamis, di mana analisis dilakukan secara simultan sepanjang proses pengumpulan data, bukan hanya setelah data terkumpul seluruhnya. Hal ini memungkinkan peneliti untuk melakukan refleksi, klarifikasi, dan pendalaman terhadap data yang diperoleh, guna meningkatkan validitas temuan.

Lokasi penelitian secara spesifik dipusatkan di Desa Dampal, sebuah desa di Kecamatan Sirenja yang menjadi wilayah terdampak signifikan oleh bencana banjir yang terjadi pada 23 Juni 2024. Penentuan lokasi ini didasarkan atas pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan representasi nyata dari wilayah yang mengalami tekanan pasca bencana dan membutuhkan intervensi kelembagaan yang sistematis dan berkelanjutan dari BPBD. Selain itu, pemilihan lokasi juga mempertimbangkan faktor kemudahan akses, keterbukaan masyarakat terhadap kegiatan penelitian, dan relevansi empiris terhadap tujuan penelitian.

Waktu pelaksanaan penelitian dirancang sejak tahap perencanaan hingga penyusunan laporan akhir selama kurang lebih enam bulan. Tahapan-tahapan tersebut meliputi penyusunan proposal, konsultasi dengan pembimbing, pengumpulan data lapangan, analisis data, penulisan draf skripsi, serta revisi berdasarkan masukan dari dosen pembimbing dan penguji. Seluruh kegiatan penelitian ini dilaksanakan dengan mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian sosial, seperti menjaga kerahasiaan identitas informan, memperoleh persetujuan partisipasi secara sukarela, dan memastikan bahwa data yang diperoleh digunakan semata-mata untuk kepentingan akademik.

Secara keseluruhan, metode penelitian ini dirancang untuk menangkap realitas sosial secara utuh dan mendalam. Pendekatan kualitatif memberikan ruang bagi interpretasi subjektif dari para informan mengenai pengalaman mereka menghadapi bencana dan interaksinya dengan lembaga pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus masukan praktis bagi penguatan peran kelembagaan dalam penanggulangan bencana yang lebih responsif, partisipatif, dan berkelanjutan di masa depan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan di Desa Dampal, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, sebuah desa yang berada di dataran rendah dan dikenal sebagai salah satu wilayah rawan banjir, terutama pada musim penghujan. Desa ini terdiri dari tiga dusun yang masing-masing memiliki karakteristik geografis dan sosial yang cukup seragam, namun sangat rentan terhadap bencana hidrometeorologi seperti banjir. Kejadian banjir bandang yang terjadi pada tanggal 23 Juni 2024 menjadi titik kritis dalam penelitian ini. Banjir tersebut bukan hanya menyebabkan genangan, tetapi juga menghancurkan rumah, merusak fasilitas publik, dan memutus akses jalan di berbagai titik. Tercatat sekitar 250 kepala keluarga atau lebih dari 800 jiwa terdampak langsung oleh kejadian ini. Selain itu, terdapat dua warga yang mengalami luka-luka dan satu rumah yang hanyut terbawa arus. Tidak hanya itu, berbagai sarana penting seperti sekolah, puskesmas, rumah ibadah, dan lahan pertanian seluas lebih dari 50 hektare juga ikut terendam dan rusak.

Dalam konteks inilah, penelitian menyoroti peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Donggala sebagai aktor utama dalam penanggulangan pasca bencana. Berdasarkan observasi langsung, wawancara dengan lima informan kunci yakni kepala desa, tokoh masyarakat, perwakilan kecamatan, dan kepala pelaksana BPBD ditemukan bahwa kehadiran BPBD sangat terbatas dan cenderung bersifat tanggap darurat semata. Hal ini berarti, meskipun BPBD bergerak cepat dalam hal distribusi bantuan logistik seperti makanan, selimut, dan tenda darurat sehari setelah bencana, namun peran lebih lanjut dalam pemulihan sosial, ekonomi, dan infrastruktur nyaris tidak terlihat. Tidak ada proses pendampingan jangka panjang, tidak ada intervensi untuk rehabilitasi rumah warga yang rusak, dan tidak ada rekonstruksi terhadap fasilitas publik yang terdampak. Dengan kata lain, pasca bencana yang seharusnya menjadi fase strategis dalam upaya pemulihan justru tidak dikelola secara terencana dan berkelanjutan.

Lebih jauh, analisis mendalam terhadap lima aspek peran BPBD berdasarkan teori Siagian (2012) yakni sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana sendiri mengungkap bahwa semua aspek tersebut belum dapat dijalankan secara optimal. Dalam perannya sebagai stabilisator, BPBD seharusnya mampu meredam kepanikan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Namun yang terjadi, masyarakat merasa khawatir terhadap potensi banjir susulan karena belum ada kepastian atau jaminan penanganan jangka panjang. Dalam aspek inovator, tidak tampak adanya strategi baru yang dikembangkan oleh BPBD. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan cenderung bersifat rutinitas administratif, tanpa ada terobosan dalam metode mitigasi atau pemulihan. BPBD juga tidak terlihat sebagai agen modernisasi, karena tidak menyelenggarakan pelatihan atau peningkatan kapasitas warga agar mereka dapat lebih siap menghadapi bencana serupa di masa mendatang.

Kemudian, peran sebagai pelopor juga tidak ditampilkan oleh BPBD. Mereka tidak mengambil inisiatif dalam membangun kolaborasi lintas sektor, seperti dengan Dinas Sosial, Dinas PU, ataupun lembaga kemasyarakatan yang sebenarnya bisa digerakkan untuk mempercepat proses pemulihan. Bahkan keterlibatan masyarakat lokal dalam proses pemulihan nyaris tidak difasilitasi. Ini menunjukkan lemahnya fungsi koordinatif dan kepemimpinan kelembagaan. Terakhir, sebagai pelaksana sendiri, BPBD tidak menjalankan fungsi langsung dalam memperbaiki kerusakan fisik maupun non-fisik. Tidak ada kegiatan rehabilitasi yang dilaksanakan secara nyata, baik berupa pembangunan rumah sementara, pemulihan lahan pertanian, maupun pelayanan psikososial bagi korban bencana.

Dengan mempertimbangkan keseluruhan data yang diperoleh, baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan tugas BPBD Kabupaten Donggala dalam penanggulangan pasca bencana banjir di Desa Dampal belum mencerminkan standar optimal dari penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, minimnya sumber daya manusia, rendahnya koordinasi antar instansi, serta tidak adanya perencanaan kontinjensi jangka panjang. Akibatnya, masyarakat Desa Dampal mengalami kerentanan yang berlarut-larut dan belum sepenuhnya mampu bangkit dari dampak bencana. Temuan ini menegaskan bahwa penanggulangan pasca bencana tidak dapat hanya berorientasi pada bantuan logistik, tetapi harus dirancang secara holistik dan berkelanjutan, mencakup pemulihan fisik, sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat secara menyeluruh.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, peran BPBD Kabupaten Donggala dalam menangani pasca bencana banjir di Desa Dampal dapat dikaji melalui lima aspek peran kelembagaan menurut Siagian, yaitu sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana sendiri. Dalam implementasinya, BPBD terlihat menghadapi sejumlah kendala struktural dan fungsional yang menyebabkan tidak semua peran dapat dijalankan secara optimal. Hal ini terutama dipengaruhi oleh faktor minimnya sumber daya manusia dan terbatasnya alokasi anggaran yang dialokasikan untuk tahapan pasca bencana, seperti rehabilitasi dan rekonstruksi. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa BPBD lebih fokus menjalankan fungsi tanggap darurat, seperti distribusi logistik, dibandingkan dengan fungsi jangka panjang yang memerlukan proses perencanaan dan pelibatan multi-pihak, seperti pemulihan infrastruktur dan kehidupan sosial masyarakat.

Dalam perannya sebagai stabilisator, BPBD seharusnya mampu menjamin terciptanya rasa aman dan stabilitas sosial di tengah masyarakat pasca terjadinya bencana. Stabilitas ini mencakup baik aspek fisik seperti perbaikan infrastruktur maupun aspek non-fisik seperti ketenangan psikologis masyarakat yang terdampak. Namun, yang terjadi di lapangan justru menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan masyarakat dan kemampuan realisasi dari pihak BPBD. Banyak masyarakat mengeluhkan belum adanya tindak lanjut yang konkret terhadap kerusakan fasilitas umum, terutama rumah-rumah warga, sarana ibadah, serta lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan utama. Akibat dari ketidakmampuan BPBD dalam memulihkan kondisi ini secara cepat dan menyeluruh, warga merasakan ketidakpastian berkepanjangan yang pada akhirnya memicu kekecewaan terhadap lembaga pemerintah. Hal ini memperlihatkan lemahnya daya dukung institusi terhadap pemulihan sosial yang komprehensif, padahal peran stabilisator seharusnya menjadi titik awal keberhasilan pasca bencana.

Adapun dalam aspek inovator, idealnya BPBD dapat mengembangkan strategi dan pendekatan baru dalam menangani dampak bencana, terutama untuk mempercepat proses pemulihan dan membangun kembali kepercayaan masyarakat. Namun, dalam konteks Desa Dampal, inovasi yang dilakukan oleh BPBD masih sangat terbatas dan cenderung bersifat normatif-administratif. Tidak tampak adanya upaya untuk melakukan pendekatan inovatif seperti pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas dalam rekonstruksi lingkungan, pelatihan kesiapsiagaan bencana pasca banjir, maupun pembentukan relawan tanggap lokal. Minimnya inovasi ini disebabkan oleh ketergantungan pada mekanisme birokratis yang panjang dan tidak adaptif terhadap situasi lapangan yang membutuhkan respons cepat. Keengganan untuk melibatkan organisasi masyarakat sipil atau sektor swasta dalam mendukung proses pemulihan juga menunjukkan rendahnya keterbukaan BPBD terhadap pendekatan kolaboratif yang kreatif.

Sebagai modernisator, BPBD seharusnya tidak hanya bertugas menanggulangi akibat bencana tetapi juga mampu menjadi agen perubahan dalam membentuk masyarakat yang tangguh terhadap bencana di masa depan. Namun, pada kenyataannya, transformasi struktural dan kultural di wilayah terdampak belum terlihat secara nyata. Upaya membangun kembali sarana dan prasarana hanya dilakukan secara terbatas, bahkan tidak menyentuh pada dimensi penguatan kapasitas sosial

masyarakat. Tidak ada proses edukasi sistematis pasca bencana yang bertujuan untuk meningkatkan literasi masyarakat terhadap risiko bencana. BPBD tampak lebih menjalankan tugas secara administratif daripada menjadi motor penggerak perubahan sosial yang progresif. Dalam hal ini, peran modernisator yang dituntut tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik, tetapi juga mencakup rekonstruksi hubungan sosial, tata kelola, dan kesadaran kolektif yang berbasis pada prinsip keberlanjutan.

Sementara itu, dalam dimensi pelopor, BPBD dituntut untuk menjadi aktor utama yang mendorong lahirnya praktik-praktik baru dalam pengelolaan pasca bencana. Namun, data lapangan mengungkapkan bahwa BPBD lebih sering bersikap reaktif daripada proaktif. Mereka baru melakukan intervensi setelah bencana terjadi dan bahkan bantuan logistik baru tiba sehari setelah bencana berlalu. Dalam hal ini, BPBD tidak menjalankan peran pelopor yang seharusnya berinisiatif sejak awal dalam mengantisipasi risiko yang akan muncul setelah banjir surut, seperti kerentanan terhadap penyakit, gangguan distribusi ekonomi, dan hilangnya akses terhadap pendidikan. Ketidaksiapan dalam menyusun rencana kontinjensi dan minimnya pelibatan komunitas dalam pengambilan keputusan menunjukkan bahwa BPBD belum mampu menjadi teladan dalam membentuk tata kelola risiko yang inklusif dan visioner.

Terakhir, dalam peran pelaksana sendiri, BPBD seharusnya bertindak sebagai pelaksana utama dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama ketika masyarakat belum memiliki kapasitas memadai untuk mandiri. Namun, hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat serta pemerintah desa menunjukkan bahwa kegiatan pemulihan secara nyata belum dilakukan oleh BPBD. Tidak ada langkah sistematis yang diambil untuk memperbaiki sarana umum yang rusak maupun merancang kembali pola pemukiman yang lebih aman dari ancaman banjir. BPBD terlihat hanya hadir secara simbolik dalam bentuk pendistribusian logistik dan kemudian menarik diri dari proses pemulihan jangka panjang. Hal ini membuktikan bahwa tanggung jawab substantif belum dijalankan sepenuhnya, sehingga masyarakat tetap dalam kondisi rentan terhadap potensi bencana selanjutnya.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menegaskan bahwa peran BPBD Kabupaten Donggala dalam penanggulangan pasca bencana banjir di Desa Dampal masih jauh dari harapan. Keterbatasan anggaran dan SDM memang menjadi faktor penghambat, tetapi lebih dari itu, lemahnya komitmen kelembagaan dan rendahnya kapasitas manajerial juga berkontribusi terhadap buruknya pelaksanaan fungsi kelembagaan. Diperlukan reformasi mendalam dalam tata kelola BPBD, baik dalam hal kebijakan, koordinasi lintas sektor, pelibatan masyarakat, maupun pelatihan internal. Penanggulangan pasca bencana tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan darurat, tetapi harus mengarah pada proses rekonstruksi yang menyeluruh, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh warga terdampak.

**Tabel 1.** Analisis peran bpbd dalam penanggulangan pasca banjir Di Desa Dampal

Aspek Peran (Siagian, 2012)	Implementasi di Lapangan	Tingkat Kinerja
Stabilisator	Hanya menyalurkan bantuan logistik, belum membangun rasa aman jangka panjang	Rendah
Inovator	Tidak ada program baru atau pendekatan alternatif pasca banjir	Rendah
Modernisator	Tidak ada penguatan kapasitas masyarakat atau pemulihan sistem sosial	Rendah
Pelopor	Tidak melakukan inisiatif strategis, hanya tanggap darurat	Sangat Rendah
Pelaksana Sendiri	Tidak ada rehabilitasi fisik atau sosial yang dilakukan langsung	Sangat Rendah

Sumber, Olah data Primer, 2024

Tabel di atas memberikan gambaran tingkat implementasi peran BPBD Kabupaten Donggala dalam penanggulangan pasca banjir. Dari lima aspek peran yang dianalisis, semuanya berada dalam kategori rendah hingga sangat rendah. Ini menunjukkan bahwa kehadiran BPBD di lapangan lebih bersifat administratif dan temporer, khususnya hanya dalam bentuk bantuan darurat, sementara aspek-aspek yang bersifat jangka panjang seperti pemulihan, edukasi masyarakat, dan rekonstruksi belum terlihat secara nyata. Misalnya, sebagai stabilisator, BPBD hanya hadir melalui distribusi logistik satu hari setelah banjir terjadi. Tidak ada program lanjutan seperti trauma healing, pemulihan ekonomi, ataupun rekonstruksi sarana umum. Sebagai inovator, BPBD tidak mengembangkan mekanisme atau sistem tanggap pasca bencana yang berbasis lokal atau komunitas. Ketergantungan pada prosedur birokrasi membuat intervensi menjadi lambat dan tidak adaptif terhadap kebutuhan lokal.

Dalam konteks modernisator, idealnya BPBD harus mengarahkan masyarakat menuju ketangguhan bencana yang lebih baik melalui edukasi dan pelatihan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan tidak adanya upaya pembinaan masyarakat setelah bencana. Hal ini diperparah oleh lemahnya peran sebagai pelopor, di mana BPBD tidak menunjukkan inisiatif ataupun kepemimpinan dalam mengkoordinasi pemulihan. Terakhir, sebagai pelaksana sendiri, BPBD tidak menjalankan perannya dalam membangun kembali fasilitas umum atau membantu masyarakat secara langsung dalam bentuk rekonstruksi tempat tinggal dan sarana sosial keagamaan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan pasca bencana banjir di Desa Dampal, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, dapat disimpulkan bahwa peran BPBD dalam konteks tersebut masih belum terlaksana secara maksimal dan komprehensif sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini terlihat dari minimnya keterlibatan BPBD dalam tahapan pemulihan pasca bencana yang meliputi kegiatan rehabilitasi fisik, pemulihan sosial ekonomi masyarakat, dan rekonstruksi infrastruktur yang terdampak. Kegiatan yang dilakukan oleh BPBD cenderung terfokus pada penyaluran bantuan logistik dalam masa tanggap darurat dan tidak berlanjut pada tahap pemulihan jangka panjang. Padahal, pasca bencana adalah fase yang sangat krusial dalam menentukan seberapa cepat masyarakat dapat kembali pulih dan menjalani kehidupan normal setelah bencana.

Kegagalan BPBD dalam menjalankan peran strategisnya sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana langsung sebagaimana dikemukakan oleh Siagian (2012) menunjukkan adanya kelemahan dalam kapasitas institusional, baik dari sisi sumber daya manusia, koordinasi lintas sektoral, maupun anggaran operasional. BPBD belum mampu menjadi aktor utama yang menginisiasi dan mengkoordinasikan upaya pemulihan secara berkelanjutan. Masyarakat Desa Dampal, yang menjadi kelompok terdampak langsung, pada akhirnya harus menanggung beban pemulihan secara mandiri tanpa dukungan yang sistematis dan berkelanjutan dari lembaga yang secara normatif memiliki mandat untuk membantu mereka. Hal ini tidak hanya mencerminkan lemahnya kinerja kelembagaan, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap efektivitas peran pemerintah daerah dalam menghadapi bencana.

Lebih jauh, peneliti menemukan bahwa peran BPBD dalam rehabilitasi dan rekonstruksi tidak tampak dalam bentuk tindakan konkret yang berdampak nyata. Tidak ada program pemulihan psikososial, tidak ada proses pendampingan ekonomi lokal, serta tidak ada strategi jangka panjang yang disiapkan oleh BPBD untuk mencegah kerusakan yang sama di masa depan. Sarana-sarana publik yang rusak seperti sekolah, tempat ibadah, lahan pertanian, dan fasilitas kesehatan belum mendapatkan perhatian penuh dari pihak terkait. Semua ini memperlihatkan bahwa BPBD belum mampu menjadikan pasca bencana sebagai momentum untuk membangun kembali (*build back better*), melainkan justru membiarkan masyarakat berada dalam kondisi rentan berkelanjutan.

Dengan mempertimbangkan seluruh temuan, maka dapat disimpulkan bahwa BPBD Kabupaten Donggala belum menjalankan perannya secara optimal dalam menanggulangi dampak pasca bencana banjir di Desa Dampal. Hal ini menjadi refleksi penting bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi sistem penanggulangan bencana yang selama ini hanya terfokus pada fase tanggap darurat, tetapi mengabaikan proses pemulihan yang bersifat multidimensi. Pasca bencana tidak cukup hanya dengan distribusi bantuan logistik; lebih dari itu, harus ada intervensi struktural dan kultural yang mampu membangkitkan kembali kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Peran BPBD seharusnya tidak hanya bersifat administratif, melainkan transformatif, yang mampu mendorong keterlibatan masyarakat dan memastikan bahwa tidak ada satu pun warga terdampak yang tertinggal dalam proses pemulihan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afilaily, N. (2022). peranan BPBD dalam penanggulangan banjir. *Etheses IAIN Kediri*, 16–35.
- Ambarwati, D. A. (2018). *Perilaku Dan Teori Organisasi* (Amirullah (ed.)). media Nusa Creative
- Anggara Bayu, Idris Adam, & Hasanah Nur. (2019). Penanganan Banjir Oleh Bpbd Di Kab Berau. *E-Journal Pemerintahan*, 2(penanggulangan banjir oleh BPBD), 1–12.
- Anggraini, T., & Agustian, D. (2021). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Upaya Pencegahan Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) Di Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 4(1), 41–46. <https://doi.org/10.33701/jkp.v4i1.1510>
- Angrelia, C., Prihastha, R., Mubarok, A. C., & Utami, W. K. (2020). Peranan Pemerintah Kota Tangerang Dalam Penanggulangan Dan Pencegahan Banjir Tahun 2020. *Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 8(1). <https://doi.org/10.34010/agregasi.v8i1.3060>
- Awusi, B. A., Nayoan, H., & Tompodung, J. (2018). Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kota Manado Dalam Upaya Penanggulangan Korban Bencana Banjir. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(2337–5736), 1–9
- Craig, L., Burman, D. D., Bitan, T., Booth, J. R., Hawkins, A. J., Christiansen, S. L., Sargent, K. P., Hill, E. J., Davidson, R. G., Snow, C. E., Costas, J., Taheri, A., Amaral, G., Bushee, J., Cordani, U. G., KAWASHITA, K., Reynolds, J. H., ALMEIDA, F. F. M. D. E., de Almeida, F Deby, A. C., Cikusin, Y., & W, R. P. (2019). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Tahap Kesiapsiagaan ( Studi Pada Kantor BPBD Kota Batu). *Jurusan Respon Publik*, 13(3), 34–41
- Heryati, S. (2020). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana. *Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP Dan KP)*, 2(2), 139–146. <https://doi.org/10.33701/jpkp.v2i2.1088>
- Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (n.d.). *Metope*. Oxford Art Online, 31–38. <https://doi.org/10.1093/gao/9781884446054.article.t057475>
- Kurniawan, G. J. (2020). Peran Civic Culture Dalam Membangun Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Melalui Komunitas Kendaraan Bermotor Di Purwokerto. 28–53.
- Lobbu, D. N., J.Lengkong, F. D., & D.Pombengi, J. (2013). Peran Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Di Desa Dodap Kecamatan Tutuyan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, J. S. (2014). *Qualitative Data Analysis* (H. Salmon (ed.); kaitlin pe). library of congress cataloging-inpublication data.
- Nurillah, S., Maulana, D., & Hasanah, B. (2022). Manajemen Mitigasi Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon di Kecamatan Ciwandan. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 334–350. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v3i1.4613>
- Reni Insiyiroh, Sri Indarti, & Darmi, T. (2023). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bengkulu dalam Penanggulangan Bencana Banjir di Kelurahan Rawa Makmur Kota

- Bengkulu. *Jurnal Manajemen Publik Dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 5(2), 223–238. <https://doi.org/10.36085/jmpkp.v5i2.5202>
- Rohmat. (2019). *bencana yang disebabkan oleh alam*. Penerbit Duta.
- Saputra, N. G., Rifai, M., & Marsingga, P. (2021). Flood Disaster Management Strategy of Karawang Regency in Karangligar Village as a Disaster Resilient Village. *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 8(1), 62–76.
- Sekartaji, D. N., Sadat, A., & Nastia. (2022). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau Dalam Penanggulangan Bencana Alam. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(7), 6967–6974.
- Siagian, S. (2012). *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi, Dan Strateginya*. PT. Bumi Aksara.
- Siyoto, S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Dalam Penelitian*.
- Sudradjat, A. R. (n.d.). *Perilaku Organisasi Sebagai Suatu Konsep & Analisis (Nilacakra 2021 (ed.); Sahban)*. Nilacakra Jl. Raya Darmasaba-Lukluk Bandung.
- Sugiyono, & Simister, N. (2015). *Metode Evaluasi*. 2012, 4.
- Taryana, A., El Mahmudi, M. R., & Bekti, H. (2022). Analisis Kesiapsiagaan Bencana Banjir Di Jakarta. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 13(2), 302. <https://doi.org/10.24198/jane.v13i2.37997>
- Yudha Pratama Saragi. (2022). Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pasca Bencana Banjir Di Kecamatan Barus Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara. *Journal Epistemikpress*, 1–15. <http://eprints.ipdn.ac.id/8631/>